

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup> Seiring dengan hal tersebut, maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.<sup>2</sup> Setiap orang pada umumnya berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya. Namun pada kenyataannya justru tidak demikian, tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya harus bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, permasalahan ekonomi dan ketidakjujuran menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perceraian terjadi, persoalan tidak begitu saja selesai, akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. Perceraian orangtua merupakan hal yang akan mengguncang kehidupan anak dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak adalah pihak yang paling dirugikan dengan terjadinya perceraian orangtuanya. Pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara semestinya. Banyaknya hak yang melekat pada anak belum cukup

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hal 137

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 137-138 .

menjamin bahwa hak anak setelah perceraian orangtuanya akan dapat dipenuhi dengan baik sesuai kepentingan anak.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Kekuasaan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, ditentukan juga dalam Pasal 50 ayat (1) bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Persoalan nafkah anak pasca perceraian sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, yaitu pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orangtua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Selanjutnya dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 149 KHI dikatakan bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orangtua, sebaliknya orangtua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orangtua, terutama bapak, baik dalam masa terjadi perkawinan ataupun perceraian. Namun pada kenyataannya nafkah anak seringkali dilalaikan jika terjadi perceraian orangtuanya.

Topik utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban pembayaran nafkah anak pasca perceraian dalam skripsi ini akan dibahas tentang “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak yang Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama” berdasarkan kasus cerai talak dalam perkara Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.SMG. Dalam putusan-putusan tersebut ditegaskan bahwa seorang suami dihukum untuk membayar sejumlah uang terkait nafkah anak yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang.

Penulis tertarik melakukan penelitian kasus ini dikarenakan banyaknya kasus cerai talak yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan mengikat, tetapi tidak secara sukarela seorang bapak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak dan memenuhi putusan yang sudah sah dimata hukum. Dengan begitu perlunya penegasan hukum agar seorang bapak atau mantan suami melaksanakan pemenuhan nafkah yang diatur dalam KHI Pasal 105 dan Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seorang bapak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (telah berusia 21 tahun). Hal tersebut ditegaskan dalam KHI menurut Pasal 149 huruf (d) *jo* Pasal 156 huruf (d) KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam kasus ini, perlunya upaya hukum yang harus dilakukan karena seorang bapak tidak secara sukarela melakukan pelaksanaan putusan pengadilan

yaitu, eksekusi yang sudah diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orangtua di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya hukum apabila orangtua tidak secara sukarela memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orangtua di Pengadilan Agama Semarang;
2. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya hukum apabila orangtua tidak secara sukarela memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan;

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

## **1. Manfaat Praktis**

Masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan, upaya hukum serta akibat hukum pemenuhan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan

## **2. Manfaat teoritis**

- a. Menambah informasi yang diharapkan dapat digunakan oleh program studi ilmu hukum dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang ada;
- b. Menambah sumber informasi untuk pengetahuan bagi program studi ilmu hukum mengenai pelaksanaan, upaya hukum serta akibat hukum pemenuhan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan Agama;
- c. Menambah sumber informasi untuk pengetahuan bagi program studi ilmu hukum mengenai pemenuhan nafkah anak bagi pencari keadilan dalam memperoleh keadilan melalui pengadilan Agama.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>3</sup> Pendekatan kualitatif merupakan tata acara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

---

<sup>3</sup> Petrus Soerjowinoto, et al, 2014, *Buku Panduan Metode penulisan karya Hukum dan Skripsi* Semarang: Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata, hal 5.

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>4</sup>

Metode ini bertujuan untuk dapat memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada pemahaman permasalahan, khususnya mengenai gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan, upaya hukum serta akibat hukum pemenuhan nafkah pasca perceraian anak yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundangan yang berlaku yang dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum serta pelaksanaan di lapangan dengan rumusan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mencari fakta yang terjadi setelah perkara diputus, serta pelaksanaan pemenuhan nafkah dan upaya hukum apabila seorang bapak atau mantan suami tidak secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan.

Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan, penulis juga menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan. Disini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah terhadap anak pasca perceraian orangtua dan realita dalam praktiknya. Dalam kasus yang penulis teliti, permasalahannya ialah dimana seorang ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian serta pemenuhan lainnya yang sudah pengadilan putuskan secara sah.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, hal 32.

### 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan erat dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai kasus perceraian dengan Nomor Putusan 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor Putusan 205/Pdt.G/2015/PA.SMG serta keterangan dari pihak yang terkait dalam kasus perceraian ini.

### 4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Jenis Data

Di dalam penelitian ini jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama tanpa adanya unsur pihak lainnya. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa informasi dan keterangan yang disampaikan saat wawancara dari pihak yang terkait dalam kasus perceraian ini. Data primer yang diperoleh berupa informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah pasca perceraian dan keterangan para pihak yang meliputi pelaksanaan pemenuhan nafkah pasca perceraian, upaya hukum, serta akibat hukumnya terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak Yang Ditetapkan Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang”



## **2) Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Pada dasarnya data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dari orang lain yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>5</sup>

Dalam penelitian, data sekunder ialah data yang mana berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Dan data sekunder juga membantu peneliti menganalisa serta memahami kasus yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku yang relevan dengan penelitian peneliti serta jurnal, skripsi, dan thesis yang dipublikasikan oleh universitas yang berhubungan dengan kasus perceraian dengan Nomor Putusan 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor Putusan 205/Pdt.G/2015/PA.SMG dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat peneliti.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data dan siapa sumbernya. Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer)

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 25.

atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis memakai teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

### **1) Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orangtua dan pelaksanaan upaya hukum apabila orangtua tidak secara sukarela memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan juga akibat hukumnya apabila kewajiban pembayaran nafkah anak ditetapkan dengan amar putusan deklaratif yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam wawancara dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penulis secara sepenuhnya. Dengan wawancara terbuka diharapkan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau pihak pertama yang terkait.

- a) Drs. M. Rizal, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan perkara Nomor 2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG;
- b) Advokat Hidayatun Rohman AM,S.H., M.H., Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah; Theodorus Yosep Parera, SH, MH, dan Advokat Yosep Parera *and partners*;
- c) para pihak yang terkait MK, pihak termohon dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG; SG, pihak termohon dalam perkara Nomor 2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG;

## **2) Studi Pustaka**

Hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal hukum yang terkait pengesahan anak luar kawin dan teori-teori yang terkait pelaksanaan pemenuhan hak nafkah terhadap anak pasca perceraian dan teori-teori yang terkait studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan terhadap hasil penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan studi pustaka, maka data dapat digolongkan dalam tiga sudut kekuatan mengikatnya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat<sup>6</sup>

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan ini terdiri dari atas norma-norma dasar yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 14

<sup>7</sup> Petrus Soerjowinoto, *Op.cit.*, hal 6

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

i) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

j) Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Putusan 205/Pdt.G/2017/PA.SMG;

k) Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Putusan 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG;

**b) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian, putusan pengadilan, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah dari kalangan hukum yang menunjang penulisan hukum ini yang berhubungan dengan ketentuan mengenai penerapan asas kebenaran formil dalam kasus yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Buku-buku tentang hukum acara perdata, pokok-pokok hukum perdata, hukum perkawinan serta hukum keluarga;
3. Buku-buku tentang hak anak dan perlindungan anak;
4. Buku-buku tentang perkawinan Islam;
5. Hasil karya ilmiah para sarjana berupa skripsi maupun tesis;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 10

6. Website-website terkait.

**c) Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan tambahan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

**5. Metode Analisa Data**

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menfasirkan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

**6. Teknik Penyajian Data**

Data yang telah terkumpul tersebut belum bisa memberikan sebuah arti bagi tujuan penelitian karena masih memerlukan pengolahan. Setelah proses pengolahan data selesai, data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam laporan hasil penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak Yang Ditetapkan Dalam Putusan Pengadilan Agama”

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dimana dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet ke-5, hal. 9

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian tentang perceraian, akibat hukum perceraian, hak anak atas nafkah, putusan pengadilan, sistematika putusan pengadilan, sifat amar putusan pengadilan, kekuatan putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai deskripsi data yang terdiri dari gambaran umum tentang pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orangtua di Pengadilan Agama Semarang, pelaksanaan upaya hukum apabila orangtua tidak secara sukarela memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, dan akibat hukumnya apabila kewajiban pembayaran nafkah anak yang ditetapkan dengan amar putusan deklaratif di pengadilan Agama Semarang.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dan disertai sarann yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran pihak-pihak yang berkepentingan.